

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Pembangunan adalah suatu implementasi yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, yang dilakukan semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah secara desentralisasi ke beberapa daerah. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang keberhasilan. Pelaksanaannya mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang *universal* untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Kegiatan program pembangunan desa selama periode orde baru, tampak bahwa program dan kegiatan tersebut mengikuti kebijakan dari atas yang didesain dengan pola cetak biru (*blue print*). Dalam kenyataannya hampir semua program dan kegiatan pembangunan desa diciptakan secara seragam untuk seluruh desa di Indonesia. Untuk pelembagaan program dan kegiatan sampai ke tingkat desa maka siapapun yang terlibat didalamnya apa dia perencana, fasilitator, pelaksana atau

konsultan bahkan termasuk lembaga donor internasional lebih banyak di lakukan dengan model wisata/kunjungan. Artinya program dan kegiatan pembangunan desa yang dilakukan melalui kunjungan ke desa dalam waktu tertentu sesuai kepentingan dan tujuan kunjungan. Program yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, penyuluhan, diskusi, temuwicara dan lain-lain bentuk kunjungan ke desa.

Desentralisasi program pembangunan ini sebagai upaya untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya dan lebih mudah dalam menyampaikan rencana dari atas (*top down*) maupun dari bawah (*Bottom Up*). Dengan demikian musyawarah pembangunan (*musbang*) sebagai forum pengambilan keputusan tahap pertama dalam pembangunan, adapun tingkat tahapannya dibagi menjadi lima yaitu, pertama, Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (*musrebangnas*) pembangunan ini merupakan tupoksi pemerintah pusat sebagai kekuasaan tertinggi negara, kedua, Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (*musrebangwil*) merupakan tupoksi pemerintah Provinsi, ketiga, Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (*musrebangkab*) merupakan tugas pemerintah kabupaten pembangunan tingkat kabupaten, keempat, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (*musrebangcam*) merupakan tugas pemerintah kecamatan, kelima, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (*musrebangdes*) merupakan kewenangan pemerintah desa dalam musyawarah pembangunan dikantor desanya masing-masing.

Berdasarkan data wilayah Indonesia masih dominan adalah wilayah pedesaan khususnya kabupaten Sumenep dibagi menjadi 332 wilayah desa, pembagian wilayah tersebut perpecahan dari 27 kecamatan dan jarak antar desa ke kota pun sangat berbeda untuk fasilitas pembangunan. Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah di republik ini sebagai pondasi/dasar negara secara kuantitatif jumlahnya lebih banyak dari pada kelurahan. Maka pemerintah desa harus benar benar professional mengenai tugas dan fungsinya dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi untuk membuat/mengambil keputusan karena desa masih mengedepankan kearifan lokal yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Adapun peran dan fungsi dari pemerintahan desa adalah sebagai berikut: Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah patner kerja dari kepala desa dalam proses pengambilan keputusan atau Implementasi pada program pembangunan yang menjadi rencana kerja dari pemerintah desa dan juga dibantu oleh kasi pemerintahan, kasi pelayanan dan kasi kesra, mengenai sekretaris desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut, pertama, sebagai pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan, kedua, pelaksana urusan keuangan, ketiga pelaksana urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang juga dibantu oleh kepala urusan dimasing masing bidang diantaranya kepala urusan umum, kepala urusan perencanaan program dan kepala urusan keuangan. Sedangkan kepala kewilayahan/dusun memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut, pertama, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah. Kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan diwilayahnya. Ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Modal dasar kelembagaan kepala desa dalam pengambilan keputusan harus mempunyai hubungan yang kondusif dengan perangkat desa dan masyarakat, adanya kelembagaan baik tingkat desa ataupun dusun, missal BPD, LPMD, PKK desa, Posyandu, Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Gapoktan, LPK Bahasa dan Lembaga Keuangan Mikro. Karena fenomena/permasalahan yang sering terjadi dalam kelembagaan didesa biasanya, kinerja aparatur pemerintah desa yang kurang, Kurangnya fasilitas pada kantor balai desa dan pendapatan aparatur yang rendah. Dengan demikian peran kepala desa sebagai pembuat keputusan harus mempunyai kemampuan yang lebih unggul supaya menjadi contoh dan teladan bagi bawahannya.

Fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu beda. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pengembangan kaum wanita dalam kegiatan pembangunan sudah banyak dilakukan, bahkan sudah masuk dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa atau kelurahan. Sudah banyak kepala desa ataupun kepala kelurahan di Indonesia yang

disandang oleh kaum wanita. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai “manajer” pemerintahan desa tentunya banyak hambatan, godaan dan tantangan yang harus dilalalui. Namun demikian tidak sedikit kepala desa atau kepala kelurahan perempuan yang sudah mencapai prestasi yang lebih berhasil dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Meskipun jumlah keterwakilan pemimpin perempuan lebih sedikit ketimbang laki-laki justru juga dapat mempengaruhi gaya sebuah pengambilan keputusan pada program pembangunan kedepan yang akan ditetapkan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Romben Rana Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-Laki	684	45,15%
2	Perempuan	831	54,85%
Jumlah		1515	100,00%

Sumber: Data Survei Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek, Merati tahun 2017

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah total penduduk desa Romben Rana 1556 jiwa, terdiri dari laki laki 684 jiwa atau 45,15% sementara perempuan 831 jiwa atau 54,85% dari jumlah penduduk yang tercatat. Perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki yang juga bisa mendorong kekuatan emansipasi perempuan untuk terjun ke dunia politik yang kerap diidentikkan dengan kaum laki-laki, termasuk terpilihnya menjadi seorang Kepala Desa Romben Rana pada tahun 2017 karena kesetaraan antara laki laki dan perempuan tidak hanya dilihat dari perbedaan jenis kelamin akan tetapi dapat dilihat dari gaya pengambilan

keputusan terhadap pembangunan.

Dikutip dari RPJM Desa Romben Rana tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kesatuan masyarakat dalam perjalanan mewujudkan visi yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa dan seluruh warga masyarakat desa Romben Rana tentang nilai kesetaraan dan keadilan gender yang isinya “Seluruh warga masyarakat desa Romben Rana tidak diperbolehkan membeda-bedakan perlakuan dan kesempatan atas jenis kelamin dan orientasi seksual.”

Desa Romben Rana merupakan salah satu desa yang memiliki beberapa potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa potensi lokal yang masih berkembang antara lain pasar tradisional, kelompok perikanan ,pertanian, usaha angkutan dan lain lain. Namun masih banyak permasalahan pembangunan yang dihadapi fasilitas sarana dan prasarana pemerintahan yang ada di wilayah desa Romben Rana berupa kantor desa beserta peralatan penunjang, jalan kampung, jembatan, selokan (saluran drainase). Dalam perkembangannya terdapat banyak perubahan berkaitan dengan perubahan tata guna lahan yang juga harus dibarengi dengan perubahan kegiatan infrastruktur (lingkungan) baik itu berupa pembangunan, rehab-rehab ataupun perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan.

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil penyusunan musrembangdes penyusunan RPJM Desa Romben Rana yang menghadirkan masing masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa, diagraf venn hubungan kelembagaan serta

kalender musim. Dibawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi seperti di atas perlu untuk mempercepat pembangunan, membangun kemandirian dan meratakan pembangunan dengan merata, oleh karena itu sebagai kepala desa perempuan penting untuk membuat sebuah keputusan.

Selama ibu Wartini menjabat dalam kepemimpinannya saat ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan melakukan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan di Desa Romben Rana, yang dapat dilihat perbaikan jalan dan pemavingan jalan hampir ke seluruh jalan lingkungan yang ada di desa Romben Rana, pengadaan pembuatan pagar makam, pengadaan pembangunan drainase, adanya perbaikan pasar tradisional untuk kenyamanan masyarakat dalam mencari penghasilan, serta adanya pelayanan yang baik di kantor maupun diluar jam kantor dan meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan tersebut juga didukung oleh partisipasi, aspirasi atau usulan masyarakat dan gotong royong dari masyarakat. Sehubungan dengan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengambilan Keputusan Kades Perempuan pada Program Pembangunan Desa romben Rana Kecamatan Dungkek” Apakah dengan banyaknya pembangunan tersebut masyarakat sedikit kurang yakin bahwa pengambilan keputusan itu adalah murni hasil identifikasinya sendiri, melainkan karena faktor ditunggangi oleh

suaminya selaku mantan kepala desa sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang masalah diatas adalah bagaimana pengambilan keputusan kades perempuan pada program pembangunan desa Romben Rama Kecamatan Dungkek?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan kades perempuan pada program pembangunan desa Romben Rama Kecamatan Dungkek.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat oleh semua pihak, adapun kontribusi penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Dapat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dengan ilmu administrasi publik tentang kepemimpinan Kepala desa perempuan yang baik dan yang harus diterapkan oleh pejabat administrasi publik untuk menjalankan tugasnya dan mengembangkan daerah yang dipimpinnya dengan baik.

Sebagai wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang pengambilan keputusan kades perempuan pada program pembangunan Desa Romben Rana Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Instansi Terkait Sebagai bahan masukan seorang wanita dalam memimpin sebuah daerah dalam pembangunan desa.
- b. Bagi Masyarakat Sebagai bahan kajian masyarakat mengkritisi pengambilan keputusan kepala desanya dalam pembangunan desa.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.
- 1.5.2. Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi:

- a. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. *Grand Theory* dan Kerangka Teori yang berisi tentang pembahasan pengambilan keputusan, Program Pembangunan Desa Romben Rana.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi:

- a. Fokus Penelitian
- b. Lokasi Penelitian
- c. Sumber Data
- d. Instrumen Penelitian
- e. Subyek Penelitian
- f. Teknik Pengumpulan Data
- g. Teknik Analisa Data
- h. Keabsahan Data

BAB IV yaitu gambaran umum objek penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah desa, kondisi geografis, jumlah penduduk, serta visi-misi kepala desa, dll.

BAB V Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan analisa pembahasan penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

BAB VI Penutup dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan

